

## **Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato**

**Purnama Sari<sup>1\*</sup>, Agus Baku<sup>2</sup>**

<sup>1\*,2</sup>Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Apakah penggunaan anggaran pendapatan serta pembelanjaan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sudah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, serta efektif. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis pendapatan dan belanja daerah melalui laporan realisasi anggaran. hasil penelitian menunjukkan Penggunaan Anggaran Pendapatan, dilihat dari sisi kinerja pendapatan dinilai kurang baik, kontribusi pendapatan asli daerah tidak mampu menunjukkan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato terhadap transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah kurang efektif dan Penggunaan Anggaran Belanja menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam melakukan penghematan sudah efisien.

**Kata kunci:** Anggaran Pendapatan; Belanja

Copyright (c) 2022 Purnama Sari

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [purnama22092015@gmail.com](mailto:purnama22092015@gmail.com)

### **PENDAHULUAN**

Dengan semakin meningkatnya akuntansi sektor publik terkhusus di Indonesia dengan sangat pesat yang disebabkan dengan munculnya era baru didalam melakukan pengelolaan keuangan daerah (Syukur dkk, 2021). Pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak kepada nasib sebuah daerah, hal ini disebabkan sebuah daerah bisa dijadikan daerah yang berkuasa serta kuat dan bisa meningkatkan lua daerahnya ataupun manjadi tidak berdaya hal ini tergantung dalam melakukan pengelolalaan keuangannya (Syamsuddin dkk, 2022). Pengelolaan daerah secara ekonomis, efisien, serta efektif danlain sebagainya maka bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang kemudian bisa mengurangkan angka pengangguran dan menurunkan tingkatan kemiskinan didaerah tersebut (Muslimin & Sulfianty, 2002). Didalam mengelola daerah bukan hanya SDM-nya saja yang diperlukan tetapi sumber daya ekonomi juga sangat diperlukan yang akan dicantumkan kedalam sebuah anggaran pemerintahan daerah (Mahmudi, 2010).

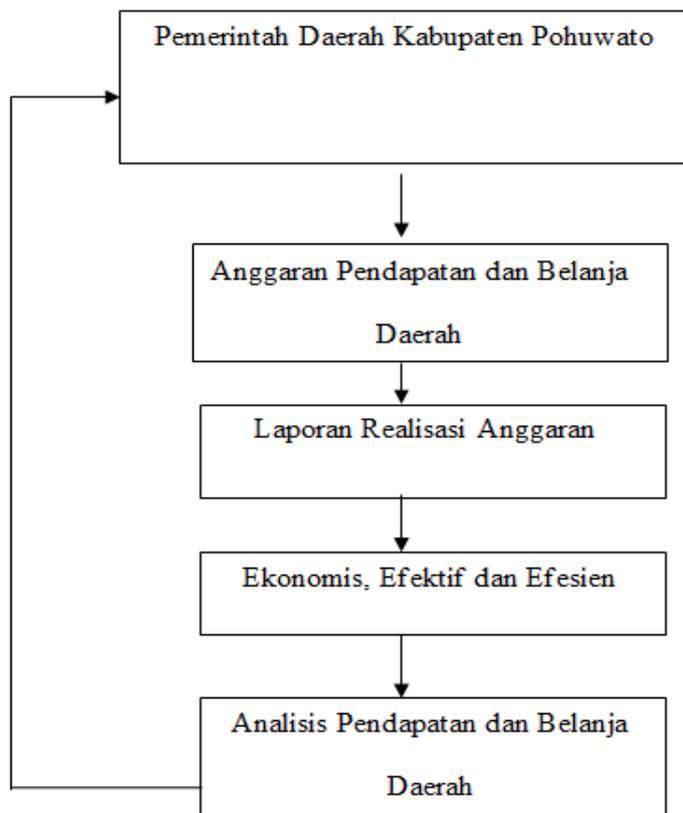
Keuangan daerah adalah sebuah dokumen publik yang wajib diketahui oleh para rakyat, terdapat 4 laporan keuangan yang harus disampaikan (Rabiyah dkk, 2021) yakni; (1) Laporan realisasi anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan arus kas, dan (4) Catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk melihat keefesienan serta keefektifitas yang berasal dari pemerintahan daerah, maka bisa dilihat kinerja tersebut melalui laporan realisasi anggaran (Karim dkk, 2022). Didalam laporan ini bisa menjelaskan mengenai bandingan antara anggaran dengan realisasi didalam sebuah waktu pelaporan, tujuan dari laporan ini yaitu memberikan informasi mengenai realisasi serta anggaran entitas pelaporan secara tersanding (Sahabuddin dkk, 2021). Dengan kegiatan penyandingan antara anggaran serta realisasi bisa mengarahkan kepada tingkatan tercapainya target yang sudah di sepakati antara eksekutif dan legislatif yang sudah sesuai dengan peraturan yang diatur di undang-undang. Laporan realisasi anggaran terdiri atas: (1) Income (pendapatan); (2) transfer; (3) Pembelanjaan; (4) Defisit; (5) Penerimaan pembiayaan; (6) Pengeluaran pembiayaan; (7) Pembiayaan bersih; dan (8) Sisa lebih atau kurangnya pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Salah satu jenis laporan keuangan daerah (Sultan, 2022) yang lebih awal dihasilkan sebelum selanjutnya di isyaratkan didalam membuat laporan nerca serta laporan arus kas disebut dengan realisasi anggaran (Muslimin & Sulfianty, 2020). Anggaran sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu pemerintahan, salah satu peran pentingnya yaitu sebagai alat stabilitas, distribusi, pengalokasian sumber daya publik, perencanaan, pengendalian organisasi serta penilaian kinerja (Ismail dkk, 2022). Dengan memperhatikan kondisi pemerintahan daerah, sehingga penulis tertarik untuk mengemukakan problem didalam proses analisis realisasi anggaran pendapatan serta belanja pemerintah daerah (Karim dkk, 2021).

Anggaran pendapatan adalah sebuah batasan minimal dari total pendapatan yang sudah dijadikan target yang harus didapatkan oleh pemerintahan daerah (Karim dkk, 2022). Pemerintah daerah dikatakan mempunyai kinerja pendapatan yang baik jika bisa mendapatkan pendapatan yang lebih dari total yang sudah dianggarkan (Mardiasmo, 2005), namun jika realisasi pendapatan di bawah total anggaran, maka hal tersebut dinilai kurang baik (Asmara, 2010). Jika sasaran pendapatan bisa didapatkan atau melebihi, maka hal tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan karena hal tersebut dianggap wajar, namun jika sasaran pendapatan tidak sesuai maka hal ini membutuhkan perhatian yang lebih lanjut yang berkaitan dengan mengapa sasaran/target tersebut tidak bisa dicapai (Assidiqi, 2016). Selisih lebih realisasi pendapatan adalah sebuah selisih yang diinginkan, sedangkan untuk selisih kurang merupakan suatu hal yang tidak diinginkan.

Pengelolaan keuangan daerah bisa berpengaruh besar terhadap nasib sebuah daerah hal ini disebabkan karena daerah bisa menjadi daerah yang kuat serta berkuasa dan bisa meningkatkan kekuasaannya ataupun (Poyoh dkk, 2017) jadi tidak berdaya yal ini tergantung dari cara pemerintah melakukan pengelolaannya. Dengan menglola daerah secara ekonomis, efisien (Saputra dkk, 2018), serta efektif ataupun bisa memenuhi *value of money*, partisipasi, sifat transparan, akuntabilitas serta keadilan yang bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang kemudian bisa menyebabkan berkurangnya tingkat pengangguran dan kemiskinan (Hanifa, 2021). Didalam mengelola daerah bukan hanya diperlukan SDMnya saja namun sumber daya ekonomi juga sangat dibutuhkan yang dicantumkan didalam sebuah

penganggaran pemerintahan daerah. Adapun bagan Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.** Kerangka Pikir Penelitian

## METHODOLOGI

### A. Jenis dan Sumber Data

Data kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau berupa angka-angka. Dalam hal ini data dari laporan Realisasi Anggaran. Data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur, namun berupa keterangan-keterangan antara lain keterangan mengenai objek yang diteliti yaitu laporan realisasi anggaran. Data yang diperoleh dari obyek penelitian berupa data sekunder yang diambil dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.

### B. Teknik pengumpulan data

Metode kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat teoritis yang bersumber dari berbagai literatur, penelitian pihak lain dan laporan yang dipublikasikan untuk mendapatkan gambaran untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang diteliti serta analisis penelitian yang akan dilakukan. Metode Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang diperlukan berupa laporan realisasi anggaran.

### C. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan merujuk pada Mahmudi (2010: 34), bahwa Analisis pendapatan dan belanja daerah melalui laporan realisasi anggaran, untuk dapat melakukan analisis pendapatan dan belanja untuk menilai apakah

penggunaan anggaran pendapatan dan belanja ekonomis, efektifitas, dan efisiensi dengan menggunakan alat analisis antara lain:

1. Analisis varians pendapatan

Selisih pendapatan = Pendapatan dana realisasi – pendapatan dana yang dianggarkan

Keterangan:

Selisih pendapatan : SP

Pendapatan dana realisasi : PR

pendapatan dana yang sudah dianggarkan : PA

Agar besar kecilnya tingkatan presentase selisih dari anggaran bisa diketahui, maka digunakan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Selisih Anggaran pendapatan}}{\text{Besarnya Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

2. Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Secara umum, nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Nilai Efektivitas PAD

Kategori	Persentase
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	100 %
Cukup Efektif	90-99%
Kurang Efektif	75-89 %
Tidak Efektif	< 75 %

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini merupakan tabel pengkategorian nilai efesiensi PAD, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.** Pengkategorian Nilai Efisiensi PAD

Presentase	Kategori
< 10 %	Sangat efisien
10 - 20 %	Efisien
21 - 30 %	Cukup efisien
31 - 40 %	Kurang efisien
> 40 %	Tidak efisien

## 5. Analisis varians belanja

SB= RB-BA

Dimana:

SB= Selisih Belanja

RB= realisasi Belanja

BA= Pendapatan yang dianggarkan

Untuk mengetahui besarnya tingkat persentase selisih dari anggaran belanja digunakan rumus:

$$\frac{\text{Selisih Anggaran Belanja}}{\text{Besarnya Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**HASIL DAN PEMBAHASAN****A. Analisis varians pendapatan**

Selisih pendapatan = Pendapatan dana realisasi - pendapatan dana yang dianggarkan

**Tabel 3.** Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pohuwato tahun 2018-2020

Keterangan	2018	2019	2020
Pendapatan dana realisasi	904.691.929.792	970.534.277.246	955.946.119.926
pendapatan dana yang dianggarkan	924.940.297.080	996.284.671.188	970.534.277.246
<b>Hasil</b>	<b>(20.248.367.288)</b>	<b>(25.750.393.941)</b>	<b>(33.185.897.716)</b>

Sumber: Hasil Penelitian, 2021.

Presentase selisih dari anggaran bisa diketahui, maka digunakan rumus berikut ini :

$$\frac{\text{Selisih Anggaran pendapatan}}{\text{Besarnya Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

**Tabel 4.** Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pohuwato tahun 2018-2020

Keterangan	2018	2019	2020
Selisih Anggaran pendapatan	20.248.367.288	25.750.393.941	33.185.897.716
Besarnya Anggaran Pendapatan	924.940.297.080	996.284.671.188	970.534.277.246
<b>Hasil</b>	<b>2,18 %</b>	<b>2,58%</b>	<b>3,41%</b>

Sumber: Hasil Penelitian, 2021.

### B. Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

**Tabel 5.** Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pohuwato tahun 2018-2020

Keterangan	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	52.151.698.921	62.337.943.760	50.953.585.078
Total Pendapatan	904.691.929.792	970.534.277.246	955.946.119.926
<b>Hasil</b>	<b>5,76%</b>	<b>6,42%</b>	<b>5,33%</b>

Sumber: Hasil Penelitian, 2021.

### 3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 6.** Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pohuwato tahun 2018-2020

Keterangan	2018	2019	2020
------------	------	------	------

Pendapatan Transfer	828.345.870.871	880.890.770.953	873.954.766.371
Total Pendapatan Asli Daerah	52.151.698.921	62.337.943.760	50.953.585.078
<b>Hasil</b>	<b>1,588%</b>	<b>1,413%</b>	<b>1,715%</b>

Sumber: Hasil Penelitian, 2021.

4. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 7.** Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pohuwato tahun 2018-2020

Keterangan	2018	2019	2020
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	52.151.698.921	62.337.943.760	50.953.585.078
Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	60.636.332.336	66.564.152.234	74.201.375.007
<b>Hasil</b>	<b>86 %</b>	<b>93,65%</b>	<b>68,66%</b>

Sumber: Hasil Penelitian, 2021.

Secara umum, nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 8.** Nilai Efektivitas PAD

Kategori	Persentase
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	100 %
Cukup Efektif	90-99%
Kurang Efektif	75-89 %
Tidak Efektif	< 75 %

Sumber: Hasil Penelitian, 2021.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 8.** Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pohuwato Tahun 2018-2020

Keterangan	2018	2019	2020
Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah	60.636.332.336	66.564.152.234	74.201.375.007
Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah	52.151.698.921	62.337.943.760	50.953.585.078
<b>Hasil</b>	<b>116,26 %</b>	<b>106,77%</b>	<b>145,62%</b>

Sumber: Hasil Penelitian, 2021.

## 5. Analisis varians belanja

SB= RB-BA

Dimana:

SB= Selisih Belanja

RB= realisasi Belanja

BA= Belanja yang dianggarkan

**Tabel 9.** Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pohuwato tahun 2018-2020

Keterangan	2018	2019	2020
Realisasi Belanja	758.514.064.354	827.465.026.349	812.324.184.587
Belanja yang dianggarkan	808.702.870.684	865.037.328.039	855.941.060.021
<b>Hasil</b>	<b>(50.188.806.330)</b>	<b>(37.572.301.689)</b>	<b>(43.616.875.434)</b>

Sumber: Hasil Penelitian, 2021.

Untuk mengetahui besarnya tingkat persentase selisih dari anggaran belanja digunakan rumus:

$$\frac{\text{Selisih Anggaran Belanja}}{\text{Besarnya Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

## 6. Rasio Efisiensi Belanja

**Tabel 10.** Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pohuwato Tahun 2018-2020

Keterangan	2018	2019	2020
<b>Selisih Anggaran Belanja</b>	50.188.806.330	37.572.301.689	43.616.875.434
<b>Besarnya Anggaran Belanja</b>	808.702.870.684	865.037.328.039	855.941.060.021
<b>Hasil</b>	6,20 %	4,34 %	5,09%

Sumber: Hasil Penelitian, 2021.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 11.** Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pohuwato tahun 2018-2020

Keterangan	2018	2019	2020
Realisasi Belanja	758.514.064.354	827.465.026.349	812.324.184.587
Anggaran Belanja	808.702.870.684	865.037.328.039	855.941.060.021
<b>Hasil</b>	<b>93,79 %</b>	<b>95,65 %</b>	<b>94,90%</b>

Sumber: Hasil Penelitian, 2021.

## C. Pembahasan

### 1. Analisis Varians Pendapatan

Hasil Analisis menunjukkan bahwa adanya selisih kurang pendapatan (*unfavourable variance*) atau selisih yang tidak diharapkan yang mana Anggaran Pendapatan tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 924.940.297.080 dan terealisasi sebesar Rp. 904.691.929.792 yang menunjukkan adanya selisih kurang pendapatan sebesar (Rp.20.248.367.288), Pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 996.284.671.188 dan terealisasi sebesar Rp. 970.534.277.246 dan tingkat persentase antara selisih anggaran pendapatan dan besarnya realisasi pendapatan pada tahun 2018 sebesar 2,18 %, 2019 sebesar 2,58 % dan tahun 2020 sebesar 3,41 % melihat hasil analisis tersebut kinerja pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dapat dinilai kurang baik, Adapun salah satu penyebab tidak tercapainya target pendapatan karena kurangnya realisasi dari penerimaan retribusi daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah mencapai 5,76 % tahun 2018, 6,42 tahun 2019 dan 5,33 % pada tahun 2020 arti kontribusi pendapatan asli daerah tidak mampu menunjukkan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi dapat dilihat dari target anggaran dengan realisasinya mengalami selisih kurang. Hasil penelitian

menunjukkan adanya jumlah pendapatan transfer yang lebih besar di bandingkan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan transfer tahun 2018 sebesar Rp. 828.345.870.871 dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 52.151.698.921 dengan persentase 1,588% . Tahun 2019 sebesar Rp. 880.890.770.953 dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 62.337.943.760 dengan persentase 1,413 % dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 873.954.766.371 dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 50.953.585.078 dengan persentase 1,715% Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato terhadap transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi.

## 2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak sesuai dengan yang ditargetkan dimana tingkat efektifitas pada tahun 2018 sebesar 86 % ini masuk kategori kurang efektif, tahun 2019 sebesar 93,65% ini masuk pada kategori cukup efektif dan pada tahun 2020 kembali menurun sebesar 68,66% ini juga masuk dalam kategori tidak efektif, dengan kata lain kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target anggaran belanja mengalami selisih lebih kurang, yang mana target anggaran belanja tahun 2018 sebesar Rp. 808.702.870.684 terealisasi sebesar Rp.758.514.064.354 dengan tingkat persentase antara selisih anggaran belanja dengan besarnya anggaran belanja sebesar 93,79 % . Tahun 2019 sebesar Rp. 865.037.328.039 terealisasi sebesar Rp. 827.465.026.349 dengan tingkat persentase antara selisih anggaran belanja dengan besarnya anggaran belanja sebesar 95,65% dan pada tahun 2020 target anggaran belanja sebesar 855.941.060.021 dengan tingkat persentase antara selisih anggaran belanja dengan besarnya anggaran belanja sebesar 94,90%. Salah satu penyebab terjadinya selisih lebih anggaran belanja adalah karena anggaran belanja tak terduga yang mana target anggaran tahun 2018,2019 dan 2020 sangat besar sedangkan realisasinya hanya sedikit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam melakukan penghematan anggaran dilihat dari tahun 2018 besarnya realisasi belanja Rp. 758.514.064.354 dengan anggaran belanja Rp. 808.702.870.684 menunjukkan adanya selisih kurang penggunaan anggaran dengan tingkat persentase 93,79 %, tahun 2019 besarnya realisasi belanja Rp. 827.465.026.349 dengan anggaran belanja Rp. 865.037.328.039 menunjukkan adanya selisih kurang penggunaan anggaran dengan tingkat persentase 95,65 % dan tahun 2020 besarnya realisasi belanja Rp. 812.324.184.587 dengan anggaran belanja Rp. 855.941.060.021 menunjukkan adanya selisih kurang penggunaan anggaran dengan tingkat persentase 94,90% dengan kata lain kemampuan pemerintah dalam melakukan penghematan sudah efisien.

## SIMPULAN

Penggunaan Anggaran Pendapatan, dilihat dari sisi kinerja pendapatan dinilai kurang baik, kontribusi pendapatan asli daerah tidak mampu menunjukkan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato terhadap transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah kurang efektif. Penggunaan Anggaran Belanja

menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam melakukan penghematan sudah efisien.

## Referensi

- Asmara, J. A. (2010). Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 3(2), 155-172.
- Assidiqi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(5).
- Hanifa, L. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016-2020. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7(4), 640-651.
- Ismail, M., Sahabuddin, R., Idrus, M. I., & Karim, A. (2022). Faktor Mempengaruhi Keputusan Pembelian Pada Online Marketplace Pada Mahasiswa Universitas Hasanuddin. *SEIKO: Journal Of Management & Business*, 5(1), 49-59. <https://doi.org/10.37531/Sejaman.V5i1.1831>
- Karim, A., Desi, N., Azis, M., & Daga, R. (2022). Kemandirian Bumdes Upaya Meningkatkan Pades Di Desa Pallatikang Kabupaten Jeneponto. *Celebes Journal Of Community Services*, 1(1), 1-13.
- Karim, A., Musa, C. I., Sahabuddin, R., & Azis, M. (2021). The Increase Of Rural Economy At Baraka Sub-District Through Village Funds. *The Winners*, 22(1), 89-95. <https://doi.org/10.21512/Tw.V22i1.7013>
- Karim, A., Syamsuddin, I., Jumarding, A., & Amrullah, A. (2022). The Effect Of Gender Independence And Leadership Style On Audit Quality In Makassar Public Accounting Offices. *International Journal Of Social Science Research And Review*, 5(7), 114-126. <https://doi.org/10.47814/Ijssrr.V5i7.341>
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Yogyakarta: UPP STIM YKPN*.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Muslimin, K., & Sulfianty, S. (2020). *Tax Sanctions And Tax Office Services Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Di Kabupaten Pohuwato*. *Al-Buhuts*, 16(2), 52-70.
- Muslimin, K., & Sulfianty, S. (2022). Pemeriksaan Manajemen Terhadap Fungsi Keuangan Pada PDAM Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. *SEIKO: Journal Of Management & Business*, 5(1), 130-136.
- Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2004 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Poyoh, C. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan Dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A. (2021). The Effect Of Awareness, Fiscus Services And Taxation Knowledge On Taxpayer Compliance At Madya Makassar Kpp. *International Journal Of Innovation Scientific Research And Review*, 3(1), 797-799.
- Sahabuddin, D. R., Idrus, D. M. I., & Abdul Karim, S. E. (2021). *Pengantar Statistika*. Lyon Pustaka. Makassar. Indonesia.

- Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANATAHUN. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 136-145.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif Dan R&D)*. Jakarta Alfabeta.
- Sultan, M. (2022). Kolaborasi Stakeholder's Dalam Penyelenggaraan Corporate University Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 3(2), 81-94.
- Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. *YUME: Journal Of Management*, 5(2), 170-177.
- Syukur, A., Novianti, A. S., & Karim, A. (2021). Financial Ratio Analysis Of Pt. Semen Tonasa Before And After Joining The Semen Indonesia Group. *International Journal Of Engineering Technology Research & Management*, 5(1), 11-17.